

2.2.2. Aset/ Modal

Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sangat diperlukan guna mendukung kegiatan rutin maupun operasional. Sebagai institusi yang keberadaannya sangat penting, sangat diperlukan fasilitas kantor yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sarana dan prasarana BPBD Prov. Kaltim berasal dari pengadaan BPBD sendiri, dari Hibah Provinsi Kalimantan Timur maupun bantuan atau hibah dari BNPB.

Tabel. 2.2.2
Sarana & Prasarana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	30,000	m ²
2	Gedung	2	Unit (2 lantai)
		3,398	m ²
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	2	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Taman Dalam	-	Area

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur selengkapnya pada tabel berikut :

No.	Jenis Sarana dan Prasarana		Volume	Sumber Perolehan		Tahun	Kondisi			Ket.
				Jumlah	Instansi		Rusak	Sedang	Baik	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Kendaraan :									
1	Mobil Rescue Komando	1 Unit	1	BNPB	2011	0	0	1		
2	Mobil Rescue	1 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1		
3	Mobil Ambulance	1 Unit	1	BNPB	2011	0	0	1		
4	Mobil Serbaguna	1 Unit	1	BNPB	2011	0	0	1		
5	Mobil Tangki Air WTP	3 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1		
			1	APBN Pusat	2007	0	0	1		
			1	Kemenko Kesra	2008	0	0	1		
6	Mobil Dapur Umum	2 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1		
			1	Kesbangpol Kaltim	2007	0	0	1		
7	Mobil Tangki Air	1 Unit	1	BNPB	2012	0	0	1		
8	Mobil Komunikasi Satelit	1 Unit	1	BNPB	2012	0	0	1		
9	Mobil Toilet/MCK	3 Unit	1	BNPB	2012	0	0	1		
			1	APBN Pusat	2007	0	0	1		
			1	Kemenko Kesra	2008	0	0	1		
10	Motor Trail	4 Unit	2	BNPB	2010	0	0	2		
			2	BNPB	2012	0	0	2		
11	Mobil Dalmas	1 Unit	1	BPBD Kaltim	2011	0	0	1		
12	Mobil Logpal (Panther)	1 Unit	1	BNPB	2013	0	0	1		
13	Mobil PMK (Roda 3)	1 Unit	1	BPBD Kaltim	2013	0	0	1		
II	Hunian :									
1	Tenda Posko :									
	- Tenda Posko Lama	1 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1		
	- Tenda Posko Baru	1 Unit	1	BNPB	2012	0	0	1		
2	Tenda Pleton	6 Unit	3	APBN Pusat	2007	0	0	3		
			3	BNPB	2010	2	0	1		
3	Tenda Regu	6 Unit	6	BNPB	2009	4	0	2		
4	Tenda Keluarga :									
	- Tenda Keluarga Lama	20 Unit	20	BNPB	2009	0	0	20		
	- Tenda Keluarga 4 x 4 m	5 Unit	5	BNPB	2010	2	0	3		
	- Tenda Keluarga Baru	20 Unit	20	BNPB	2012	0	0	20		
5	Tenda Pengungsi	5 Unit	5	BNPB	2012	1	0	4		
6	Tenda Kanvas	3 Unit	3	BNPB	2009	0	0	3		
III	Alat Komunikasi :									
1	Rig Lengkap Antena	3 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1		
			2	BNPB	2012	0	0	2		
2	HT	16 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1		
			5	BNPB	2012	0	0	5		
			10	BPBD Kaltim	2009	10	0	0		
3	SSB	2 Unit	2	BNPB	2012	0	0	2		
4	Wireless	2 Unit	2	BPBD Kaltim	2009	0	0	2		
5	Megaphone	2 Unit	2	BPBD Kaltim	2009	0	0	2		
6	GPS	3 Unit	2	BPBD Kaltim	2009	0	0	2		
			1	BPBD Kaltim	2011	0	0	1		

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Sumber Perolehan		Tahun Pengadaan	Kondisi			Ket.
			Jumlah	Instansi		Rusak	Sedang	Baik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Perahu :								
1	Perahu Karet :								
	- Kapasitas 8 orang	2 Unit	2	BNPB	2009/2010	2	0	0	
	- Kapasitas 10 orang	3 Unit	3	BNPB	2009/2010	2	1	0	
	- Kapasitas 12 orang	8 Unit	2	BNPB	09/10/2012	2	0	0	
			6	Kesbangpol Kaltim	2007	6	0	0	
	- Kapasitas 10 orang (Sillinger)	2 Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	
			1	BNPB	2013	0	0	1	
2	Body Speedboat (Fiber)	1 Unit	1	Kesbangpol Kaltim	2007	0	0	1	
	Speedboat (Fiber)	1 Unit	1	BPBD Kaltim	2014	0	0	1	
3	Body Speedboat (Fiber) + Mesin Suzuki 40 PK	1 Unit	1	APBN Pusat	2009	0	0	1	
4	Mesin Perahu :								
	- 25 PK	6 Unit	3	APBN Pusat	2007	0	0	3	
			3	BNPB	2009/2012	0	0	3	
	- 40 PK	5 Unit	3	APBN Pusat	2007/2008	0	0	3	
			1	BNPB	2012	0	0	1	
			1	BNPB	2013	0	0	1	
	- 15 PK	1 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
	- 30 PK	1 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
5	Perahu Polyetellin Kap. 6 org + 12 Pelampung + 4 Dayung	2 Unit	2	BNPB	2013	0	0	2	
6	Perahu Ampibhi	1 Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	
V	Genset :								
1	Krisbow 500 Watt	2 Unit	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2	
2	Genset 1,2 KW	1 Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	
3	Genset 10 KA	1 Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	
4	Genset 5 KVA	2 Unit	2	BNPB	2013	2	0	0	
5	Genset Light Tower Portable Stamford	1 Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	
VI	Alat Penerangan :								
1	Lampu Saklar	2 Unit	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2	
2	Kabel Listrik	3 Roll	3	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	1	2 terpakai
3	Lampu Senter	10 Unit	10	BNPB	2010	7	0	3	
4	Solar Lamp (Lampu Penerangan)	7 Unit	7	BNPB	2012	0	0	10	
5	Solar Handle Lamp	40 Unit	40	BNPB	2012	0	0	40	
6	Senter HID Search Light	2 Unit	2	BNPB	2011	0	0	2	
		2 Unit	2	BNPB	2012	0	0	2	
VII	Water Treatment Portable	1 Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	
		1 Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Sumber Perolehan		Tahun Pengadaan	Kondisi			Ket.
			Jumlah	Instansi		Rusak	Sedang	Baik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	Peralatan Lainnya :								
1	Fleksibel Tank Kap. 2000 ltr	2 Buah	2	BNPB	2011	0	0	2	
2	Fleksibel Tank Kap. 1000 ltr	2 Buah	2	BNPB	2011	0	0	2	
3	Mesin Pompa Air	1 Buah	1	BNPB	2010	0	0	1	
	Mesin Pompa Air + Pelampung	3 Buah	3	BNPB	2013	0	0	3	
4	Velbed	138 Buah	88	BNPB	09/10/12	20	0	68	
			50	BPBD Kaltim	2010	20	0	30	
5	Pelampung	72 Buah	52	APBN Pusat	2007	27	0	25	
			20	BNPB	2009	10	0	10	
6	Ransel	15 Buah	15	APBN Pusat	2007	10	0	5	
7	Kantong Tidur	15 Buah	15	APBN Pusat	2007	9	0	6	
8	Sepatu Boat	15 Psng	15	APBN Pusat	2007	10	0	5	
9	Tali Karmantel Statik 11 mm panjang 200 m	2 Roll	2	Kesbangpol Kaltim	2009	1	0	1	
10	Tali Karmantel Dinamik 11 mm panjang 200 m	2 Roll	2	Kesbangpol Kaltim	2009	1	0	1	
11	Carabiner Screwgate	10 Buah	10	Kesbangpol Kaltim	2009	2	0	8	
12	Figure Of Eight	10 Buah	10	Kesbangpol Kaltim	2009	2	0	8	
13	Sit Hardness	10 Buah	10	Kesbangpol Kaltim	2009	2	0	8	
15	Tandu Evakuasi	10 Buah	10	Kesbangpol Kaltim	2009	5	0	5	
16	Trolly Perahu Fiber	2 Buah	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2	
17	Ompreng	8 Lusin	8	Kesbangpol Kaltim	2009	2	0	6	
18	Rice Coker 10 Kg	2 Buah	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2	
19	Tabung Gas	2 Buah	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2	
20	Termos Nasi	5 Buah	5	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	5	
21	Sendok Makan	25 Lusin	25	Kesbangpol Kaltim	2009	12	0	13	
22	Tempat Sayur besar	3 Buah	3	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	3	
23	Compresor Super Shape 2 HP + mesin Robin 5 PK	1 Unit	1	BPBD Kaltim	2010	0	0	1	
24	Tempat tidur PB	3 Buah	3	BPBD Kaltim	2010	0	0	3	
25	Trolly Mesin Speed	10 Buah	10	BPBD Kaltim	2010	0	0	10	
26	Trailer Perahu Karet	1 Buah	1	BPBD Kaltim	2010	0	0	1	
27	Rak Perahu Karet	1 Buah	1	BPBD Kaltim	2010	0	0	1	
28	Rak Tempat Barang	2 Buah	2	BPBD Kaltim	2010	0	0	2	
29	Gergaji mesin (chainsaw)	2 Unit	2	BNPB	2013	0	0	2	
30	Kursi	65 Unit	65	BPBD Kaltim	2012/2013	5	0	60	
31	Meja	4 Unit	4	BPBD Kaltim	2012/2013	0	0	4	
32	Dongkrak (kap. 2 ton)	1 Unit	1	BPBD Kaltim	2013	0	0	1	
33	Trolly barang	2 Unit	2	BPBD Kaltim	2013	0	0	2	
34	Papan tulis	4 Unit	4	BPBD Kaltim	2013	0	0	4	
35	Tandon Air (kap. 1200 ltr)	6 Unit	6	BPBD Kaltim	2013	0	0	6	
36	Peralatan SAR	1 Set	1	BPBD Kaltim	2014	0	0	1	

Sumber: Data Inventaris Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2018

2.3 KINERJA PELAYANAN BPBD

Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Timur. khususnya dalam kinerja pelayanan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, mengarah pada :

- (1). Pra Bencana;
- (2). Tanggap Darurat Bencana;
- (3). Pasca Bencana

Program yang telah ditetapkan di tahun 2014-2018 telah dijabarkan pada kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, pada saat ini kondisi di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, Pemukiman penduduk, banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menjadi bencana

tahunan di Kalimantan Timur serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tertuang pada Skala Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur yakni dalam rangka penyiapan penguatan kapasitas kelembagaan di daerah dalam menyelenggarakan berbagai program penanggulangan bencana kedepan yang sejalan dengan asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai UU RI No. 24 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam rangka melaksanakan arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2013-2018 Provinsi Kalimantan Timur.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan upaya mitigasi atau pengurangan terhadap dampak lingkungan sebagai akibat dari bencana, yaitu dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana, pemaduan program/kegiatan/sub kegiatan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Mengembangkan sistim penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur, yaitu dengan peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana, kemandirian wilayah atau daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara dini, serta manajemen data dan informasi kebencanaan.

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yaitu dengan membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2014-2018
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	IKK	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase peningkatan jumlah desa/kelurahan/ kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana (%)				20	20	40	60	80	20	20	20	33,33	30,00	100	100	50	55,6	37,5
2	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)					20	30	70	100		20	50	78,57	60,00		100	166,667	112	60
3	Respon Time tanggap darurat (Jam)				72	72	60	54	48	72	72	60	48	48,00	100	100	100	88,9	100
4	Prosentase Korban Bencana yang diberikan bantuan melalui BPBD Kab/Kota (%)				75	80	85	85	85	75	80,5	85	76,47	85,00	100	101	100	90	100
5	Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan (%)				40	40	50	60	70	40	40	50	60	69,62	100	100	100	100	99,5

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat lihat bahwa ;

1. Pada indikator kinerja 1 untuk prosentase peningkatan jumlah desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana, realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 20 % , tahun 2016 sebesar 20 %, dan tahun 2017 sebesar 20 %, tahun 2018 dengan target 30 % dari target 30 %, dengan capaian kinerja 100 %. Tahun 2018 sebesar 30

% Tidak ada peningkatan kinerja yang signifikan karena pelaksanaan kegiatan terkendala pada tidak tersedia anggaran untuk pembangunan peralatan EWS Banjir dari tahun 2016, 2017 sampai dengan tahun 2018.

2. Pada indikator kinerja 2 untuk prosentase desa/kelurahan tangguh bencana realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 60 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 % sesuai yang ditargetkan, mengalami kenaikan 9,09 % dari tahun 2017. Pelaksanaan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana dengan kegiatan Fasilitasi Pencegahan Bencana Berbasis Masyarakat yang kemudian pada tahun 2016 dilakukan revisi nama kegiatan menjadi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, kegiatan di tahun 2018 memasuki tahun ke lima Renstra BPBD Prov. Kaltim dengan target 60 % dari target Renstra yang seharusnya sebesar 100 % atau 12 desa/kelurahan tangguh bencana dari total 20 jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang difasilitasi sampai dengan tahun akhir RPJMD 2013-2018. Tahun 2018 lokasi desa/kelurahan tangguh bencana dilaksanakan pada 1 Kabupaten yaitu di 1 (satu) Kelurahan Saloloang di Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara keseluruhan desa / kelurahan tangguh bencana yang telah dibentuk dari tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 12 desa/kelurahan.

**Daftar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

Kabupaten/Kota	DESTANA	Tahun Pembentukan	Sumber Dana
Samarinda	1. Kelurahan Lempake 2. Kelurahan Sungai Siring	2013 2013	APBN APBN
Kutai Kartanegara	1. Kelurahan Loa Ipuh Darat 2. Desa Purwajaya	2014 2014	APBN APBN
Kutai Timur	1. Desa Sepaso 2. Desa Margo Mulyo 3. Desa Sangata Selatan 4. Desa Swarga Bara	2015 2015 2015 2015	APBD APBD APBN APBN
Paser	1. Desa Tanah Priuk 2. Kelurahan Long Kali	2015 2015	APBD APBD
Penajam Paser Utara	1. Desa Sumber Sari Babulu 2. Lok Dam Sepaku	2015 2015	APBN APBN
Berau	1. Kampung Tumbit Melayu 2. Kelurahan Sambaliung	2016 2016	APBD APBD
Kutai Barat	1. Kampung Muara Batuq 2. Kelurahan Melak Ilir	2016 2016	APBD APBD
Bontang	1. Kelurahan Lok Tuan 2. Kelurahan Berbas Pantai	2016 2016	APBD APBD
Penajam Paser Utara	1. Desa Api-api	2017	APBD
Penajam Paser Utara	1. Kelurahan Saloloang	2018	APBD

3. Analisis keberhasilan pada indikator kinerja 1 untuk prosentase peningkatan jumlah desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana dengan capaian kinerja 100 % dari target yang direncanakan, walaupun capaian kinerja 100 % di tahun 2018 namun bila dilihat dari segi realisasi kinerja sampai dengan target akhir Renstra BPBD Prov. Kaltim sangat minim dari target yang seharusnya dicapai 80 % hanya dapat dicapai 30 % saja. Hal ini disebabkan antara lain ; 1) Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 903/030/003-II/Keu Tanggal 5 Januari 2016 Perihal

Penundaan Belanja 35 % pada SKPD Tahun Anggaran 2016 Tentang Surat Edaran pada point 4 dengan bunyi Penundaan , serta Menyesuaikan Hasil Evaluasi Mendagri sebagaimana Keputusan Kemendagri No. 903-6129 Tahun 2015 tentang Evaluasi Raperda Provinsi Kalimantan Timur tentang APBD TA. 2016 dan Rapergub Kaltim tentang Penjabaran APBD TA 2016, Lampiran 2 pada butir d. 1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.31.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur Rp. 600.000.000,-. Kemudian keterbatasan anggaran pada tahun 2017 dan tahun 2018 menyebabkan minimnya pembiayaan pemeliharaan beberapa unit alat EWS yang ada, serta masih kurangnya data jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang ada di BPBD Kabupaten/ Kota.

4. Analisis keberhasilan pada indikator kinerja 2 untuk prosentase desa/kelurahan tangguh bencana, dengan capaian kinerja 100 % sesuai target yang direncanakan, antara lain; 1) Sinergitas dengan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana cukup baik; 2) Respon masyarakat dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana cukup baik; 3) Meskipun pelaksanaan kegiatan 100 % namun karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga tahapan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana belum seluruhnya terlaksana, hal ini berpengaruh terhadap kualitas desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk. Target pembentukan yang seharusnya 6

desa/kelurahan dipenuhi, hanya mampu dilaksanakan 1 desa/kelurahan. target tahun 2018 sebesar 60 % walaupun capaian kinerja 100 % namun bila dilihat dari segi realisasi kinerja sampai dengan target akhir Renstra BPBD Prov. Kaltim kurang dari target yang seharusnya dicapai 100 % hanya dapat dicapai 60 % saja.

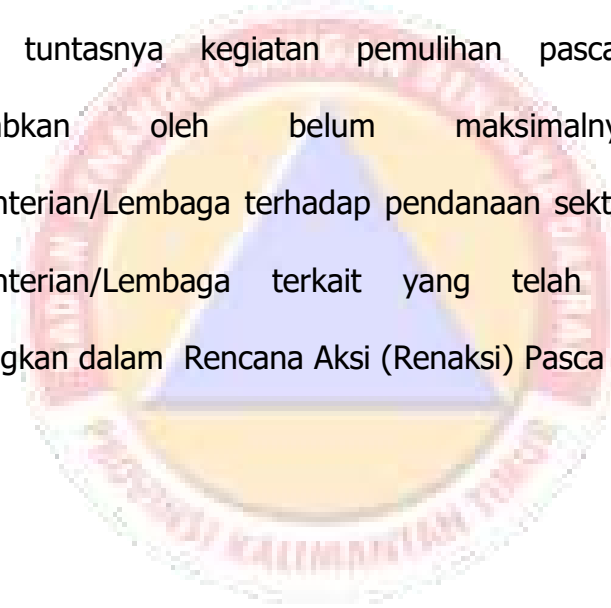
5. Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 untuk indikator kinerja **"Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan"**, sebesar 99,46 % mengalami peningkatan sebesar 16,03 % dibandingkan tahun 2017, namun bila diukur dari target yang ingin dicapai sebesar 100 % hanya dapat terealisasi sebesar 99,46 %, Hal ini disebabkan karena adanya perubahan jadwal atau penambahan waktu pelaksanaan fisik pembangunan penahan ombak dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan segera setelah tanggap darurat selesai, berimplikasi pada percepatan penyiapan dokumen Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Aksi (Renaksi) Pasca Bencana;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan e-jitupasna disebabkan oleh keengganan untuk menggunakannya, kapasitas Sumber Daya

Manusia Pemerintah Daerah, belum adanya dukungan pemenuhan kuantitas kebutuhan Sumber Daya Manusia di lapangan;

- c. Ketidaklengkapan dokumen/ usulan dari Pemerintah Daerah menyebabkan terhambatnya bantuan dana hibah Rehabilitasi Rekonstruksi sehingga pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi bagi masyarakat kurang optimal;
- d. Tidak tuntasnya kegiatan pemulihan pascabencana masih disebabkan oleh belum maksimalnya komitmen Kementerian/Lembaga terhadap pendanaan sektoral kewenangan Kementerian/Lembaga terkait yang telah disepakati dan dituangkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pasca Bencana.



Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-					Rata rata Pertumbuhan Tahun ke-	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.351.450.000	1.661.950.000		3.876.785.330		1.252.585.998	1.603.681.327		58		93	96	1.506.700.000	2.244.350.885
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				1.351.450.000	1.661.950.000		5.298.000		1.252.585.998	1.603.681.327		62		93	96	1.506.700.000	953.855.108
Program Pelayanan Administrasi		6.688.099.419	5.018.327.380				262.311.169	3.683.429.215				62	73			5.853.213.400	1.972.870.192
Penyediaan jasa surat menyurat		8.500.000	10.000.000				75.926.000	5.100.000				56	51			9.250.000	40.513.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya		424.440.000	519.600.000				29.898.700	301.652.309				97	58			472.020.000	165.775.505
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		136.000.000	157.469.180				340.791.000	133.153.360				80	85			146.734.590	236.972.180
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan		30.800.000	193.997.500				65.544.500	163.122.098				43	84			112.398.750	114.333.299
Penyediaan jasa kebersihan kantor		425.000.000	345.150.000				176.444.500	345.150.000				100	100			385.075.000	260.797.250
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		150.704.000	75.000.000				29.876.700	47.855.500				100	64			112.852.000	38.866.100
Penyediaan alat tulis kantor		176.455.419	150.000.000				24.971.600	148.096.950				100	99			163.227.710	86.534.275
Penyediaan barang cetakan dan		30.000.000	50.400.000				14.918.000	33.373.400				99	66			40.200.000	24.145.700
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		25.000.000	48.000.000				79.987.500	42.702.200				100	89			36.500.000	61.344.850
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15.000.000	17.000.000				480.949.745	11.700.000				96	69			16.000.000	246.324.873
Penyediaan makanan dan minuman		80.000.000	75.000.000				327.364.554	41.670.000				94	56			77.500.000	184.517.277
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		500.000.000	603.580.700				197.750.000	366.944.773				94	61			551.790.350	282.347.387
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah		350.000.000	502.350.000				547.829.506	274.847.182				24	55			426.175.000	411.338.344
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan		210.000.000	297.000.000				85.450.000	297.000.000				97	100			253.500.000	191.225.000
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				89.000.000	82.000.000				78.955.100	81.244.900				89	99	85.500.000	80.100.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran				23.000.000	16.000.000				18.550.000	15.861.400				81	99	19.500.000	17.205.700
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan				66.000.000	66.000.000				60.405.100	65.383.500				92	99	66.000.000	62.894.300
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.324.350.000	1.361.390.000				184.379.000	893.317.443				92	66			1.842.870.000	538.848.222
Pembangunan Gedung Kantor		88.400.000	0				273.170.506	0				86				44.200.000	136.585.253
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1.675.450.000	612.390.000				4.830.000	577.744.000				97	94			1.143.920.000	291.287.000
Pengadaan mebelair		38.000.000	0				51.360.000	0				86				19.000.000	25.680.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		200.000.000	195.000.000				23.520.000	193.460.000				86	99			197.500.000	108.490.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		317.500.000	539.000.000				27.840.000	112.418.443				86	21			428.250.000	70.129.222
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		5.000.000	15.000.000				536.124.350	9.695.000				83	65			10.000.000	272.909.675
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana				90.650.000	207.350.000		30.250.000		89.869.400	207.008.400		80		99	100	149.000.000	109.042.600
Program peningkatan disiplin aparatur		59.800.000	27.300.000				126.800.000	25.095.000				85	92			43.550.000	75.947.500
Pengadaan PDH		27.400.000	27.300.000				77.360.000	25.095.000				70	92			27.350.000	51.227.500
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		32.400.000					331.964.350					86				32.400.000	331.964.350
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		647.400.000	587.433.099				168.164.238	538.155.242				83	92			617.416.550	353.159.740
Pendidikan dan pelatihan formal		150.000.000	219.600.000				168.164.238	170.322.150				83	78			184.800.000	169.243.194
Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana		110.000.000	127.846.599				639.785.000	127.846.592				84	100			118.923.300	383.815.796
Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana		387.400.000	239.986.500				639.785.000	239.986.500				84	100			313.693.250	439.885.750
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				663.900.000	579.300.000				643.783.640	571.441.703				97	99	621.600.000	607.612.672
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah				580.400.000	493.800.000				560.799.950	486.410.503				97	99	537.100.000	523.605.227
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				83.500.000	85.500.000				82.983.690	85.031.200				99	99	84.500.000	84.007.445

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-					Rata rata Pertumbuhan Tahun ke-	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		202.550.581	366.755.000				1.439.996.252	330.608.310								284.652.791	885.302.281
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		202.550.581	366.755.000				412.151.700	330.608.310				77	90			284.652.791	371.380.005
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		761.600.000	734.765.900				393.527.000	674.775.700								748.182.950	534.151.350
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		761.600.000	734.765.900				148.046.654	674.775.700					92			748.182.950	411.411.177
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan		1.878.500.000	1.235.509.137				363.761.698	1.023.988.002				67	92			1.557.004.569	693.874.850
Penanggulangan Bencana Daerah												69	92				
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		454.150.000	226.234.300				122.509.200	226.152.500				78	83			340.192.150	174.330.850
Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana		522.300.000					1.236.445.800					77	100			522.300.000	1.236.445.800
Pengembangan SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan		219.750.000	495.120.970				1.236.445.800	345.120.651				77	70			357.435.485	790.783.226
Penyusunan Database dan Pemetaan Rawan Bencana		524.400.000	267.862.517				1.935.860.316	242.176.264				85	90			396.131.259	1.089.018.290
Penyebaran Informasi Peringatan Dini kepada Masyarakat		157.900.000	246.291.350				539.250.700	210.538.587				77	85			202.095.675	374.894.644
Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan		106.581.800		114.960.000	97.300.000				106.581.800	96.655.900				93	99	106.280.600	101.618.850
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana		1.600.000.000					755.642.516					83				1.600.000.000	755.642.516
Fasilitasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat		1.600.000.000					128.627.600					79				1.600.000.000	128.627.600
Penanggulangan bencana berbasis masyarakat			776.355.380	185.040.000	237.500.000			654.216.380	182.893.700	233.371.200			84	99	98	399.631.793	356.827.093
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana		2.288.775.000	2.768.822.938				512.339.500	2.560.699.340				98	92			2.528.798.969	1.536.519.420
Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana				375.000.000	2.025.000.000				369.381.650	1.699.154.341				99	84	1.200.000.000	1.034.267.996
Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana		697.200.000	530.239.900				1.398.450.201	528.055.800				81	100			613.719.950	963.253.001
Pengembangan Sistem Logistik dan Peralatan		906.100.000	1.096.858.650				285.548.450	1.005.934.098				87	92			1.001.479.325	645.741.274
Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana		163.850.000	339.968.816				922.502.898	255.630.049				77	75			251.909.408	589.066.474
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)		521.625.000	801.755.572				190.398.853	771.079.393					96	96		661.690.286	480.739.123
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		1.724.525.000	1.231.874.874					1.204.420.388					98			1.478.199.937	1.204.420.388
Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		327.000.000	263.534.624					260.024.138					99			295.267.312	260.024.138
Penyusunan Rencana Aksi Penentuan Prioritas Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana		1.198.275.000	428.800.000					428.800.000					99			813.537.500	428.800.000
Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		199.250.000	539.540.250	355.000.000	225.000.000			515.596.250	288.620.309	221.307.950			100	81	98	329.697.563	341.841.503

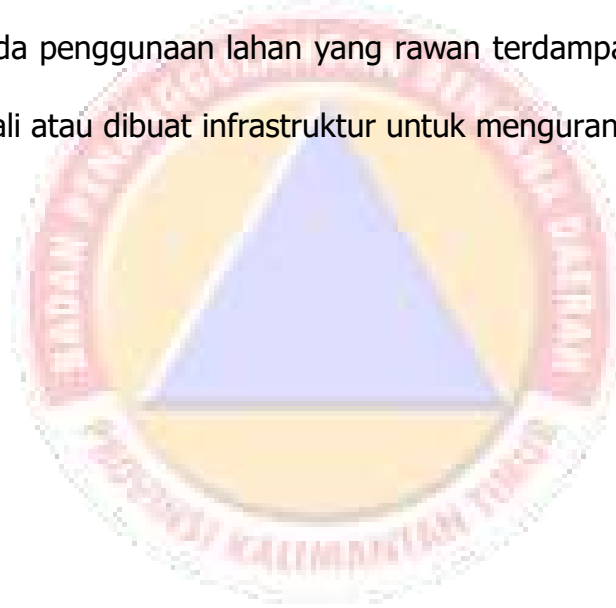
Tabel 2.4 menunjukkan bahwa sasaran utama BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai dengan menggunakan anggaran di bawah pagu (realisasi keuangan kurang dari 100%) pada tiap tahun dalam keseluruhan periode (lima tahun). Hal ini disebabkan oleh kebijakan rasionalisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan tanpa mengurangi kualitas hasil kerjanya, serta untuk tolak ukur indikator kinerja pada program lebih di titikberatkan pada persentase desa tangguh bencana yaitu melalui pembentukan desa tangguh yang kemudian didalam desa tangguh tesebut dibentuk relawan yang diharapkan hal ini dapat meningkatkan kapasitas wilayah dalam upaya kemandirian terhadap penanggulangan bencana.

2.4 Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan PD Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur selain berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, juga mempedomani dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tataruang. Selain itu, dokumen Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2014-2018 didasari pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kejadian bencana alam di Indonesia yang terulang baik jenis yang sama

maupun berbeda mendorong semakin pentingnya peran pengurangan risiko bencana. Hyogo Framework for Action (HFA), yang disepakati dalam Konferensi Pengurangan Risiko Bencana Dunia di Kobe pada tahun 2005, mengamanatkan perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat untuk pengurangan risiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalam pengurangan risiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik perencanaan baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Pengurangan risiko bencana umumnya dilakukan secara struktural yaitu membangun fisik misalnya tanggul sungai, namun dapat juga dilakukan dengan cara lain, salah satunya dengan peningkatan ketahanan komunitas (community resilience) masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadopsi perencanaan tata ruang khususnya isi pola ruang. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RTRW diharapkan menjadi dasar dalam pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terhindar dari bencana, setiap wilayah di Indonesia selalu dijumpai bagian yang rawan bencana. Kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini banyak bertampalan dengan wilayah rawan bencana. Oleh karena itu perlu suatu kegiatan untuk mengintegrasikan antara RTRW dengan kondisi bencana di Indonesia. Struktur ruang khususnya jaringan jalan dapat memberikan akses ke wilayah terdampak longsor maupun banjir dengan baik sehingga

evakuasi mudah dilaksanakan. Integrasi diperlukan untuk mengimplementasikan pola ruang maupun struktur ruang selanjutnya yang diperlukan untuk kajian rekayasa penanggulangan wilayah rawan bencana dengan cara struktural berupa bangunan fisik, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dan pemasangan instrumen peringatan dini yang akan dipasang pada wilayah rawan bencana. Alokasi pola ruang khususnya pada penggunaan lahan yang rawan terdampak bencana perlu ditinjau kembali atau dibuat infrastruktur untuk mengurangi dampak



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pembangunan bertujuan untuk menemukan suatu keadaan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Perubahan siklus alam atau fenomena alam, serta perlakuan terhadap lingkungan tentu berdampak dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan alam tersebut. Permasalahan umum kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah :

1. Kondisi alam Kalimantan Timur yang sangat luas dengan berbagai kondisi biologis, geologis, geografis, hidrologis, klimatologis beragam merupakan wilayah yang rawan bencana dan permasalahan tersendiri dalam penanggulangannya.
2. Penanganan kejadian bencana masih bersifat parsial, ditangani oleh berbagai lembaga/instansi, sehingga kurang terkoordinir, kurang efektif dan efisien.

3. Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana dan kedaruratan, membutuhkan upaya penanggulangan yang terencana, terpadu dan sistematis.
4. Terbatasnya prasarana sarana, sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya dan juga anggaran untuk penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks dari faktor lingkungan internal dan faktor eksternal, adapun penjelasannya sebagai berikut :

3.1.1. Analisa Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional di bidang penanggulangan bencana;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana di dalam melakukan pelayanan publik;
- c. Tersedianya anggaran penanggulangan bencana yang mencukupi;
- d. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- e. Dimilikinya pemimpin yang kuat, semangat dan tanggungjawab, dimana pemimpin yang memiliki semangat tentang pekerjaannya atau kehidupannya akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat serta bertanggungjawab. Pemimpin yang kuat mampu mengambil keputusan dengan tegas yang artinya harus menerima tanggung jawab atas keputusan yang dibuat dan konsekuensi yang ditimbulkan. Tidak hanya itu, kemampuan untuk menindaklanjuti juga berperan penting yaitu mampu melihat konsekuensi dari keputusan manajerial sampai akhir dan menerima tanggung jawab penuh untuk tim.

2. Kelemahan

- a. Lemahnya Koordinasi baik untuk antar SKPD dan antara pimpinan dengan bawahan, masih adanya ego sektoral diantara bidang-bidang, masih rendahnya komitmen dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang diembankan kepada

bawahan dan belum sinergi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- b. Masih rendah pemberian penghargaan (reward) bagi sumberdaya manusia yang berprestasi dibidangnya dan diperlukan pemberian sanksi (punishment) dari pimpinan terhadap bawahan yang dipimpinnya bagi sumberdaya manusia yang melalaikan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada bawahan;
- c. Belum lengkapnya standar operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedur secara utuh;
- d. Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan kondisi alam perubahan iklim dan cuaca, hal ini disebabkan masih lemahnya jumlah tenaga yang profesional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- e. Belum optimalnya fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi serta masih lambatnya penyampaian pelaporan kepada pimpinan secara berjenjang.

3.1.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Adanya kemitraan luar negeri dalam penanggulangan bencana baik berupa manajemen kebencanaan dan penanggulangannya serta dibukanya peluang mengikutsertakan sumberdaya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti program magang ke luar negeri untuk penanggulangan bencana;
- b. Adanya kemitraan dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan stakeholder-stakeholder mitra penanggulangan bencana meliputi dunia usaha, lembaga usaha masyarakat dan Forum Kaltim Peduli Bencana;
- c. Adanya kemudahan dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan dengan memanfaatkan website penanggulangan bencana;
- d. Adanya kepercayaan masyarakat, dukungan DPRD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana;
- e. Adanya program prioritas desa tangguh bencana yang menjadi program unggulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Ancaman

- a. Sangat luasnya cakupan wilayah pengawasan dan fenomena alam yang sulit diprediksi;
- b. Beratnya medan dan susah akses untuk mencapai lokasi bencana mengakibatkan risiko kerja sangat tinggi;
- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- d. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memerhitungkan kelestarian lingkungan;
- e. Penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tahapan awal untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah dengan melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 telah merumuskan Visi Pembangunan Kalimantan Timur 2019-2023 yaitu: "Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat". Visi Kalimantan Timur yang berdaulat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang bermartabat, berkualitas dan memiliki daya saing.

2. Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur dengan wawasan lingkungan.
3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan, swasembada pangan dan ketercukupan sandang dan papan.
4. Kalimantan Timur mampu berintegritas dalam pemerintahan, hukum dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.
5. Kalimantan Timur mampu menjamin pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan energi.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur 2019-2023 tersebut dirumuskanlah 5 (Lima) misi yang sinergis dan saling menunjang, yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
- 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;**
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah terletak pada penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tujuan 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditempatkan pada misi keempat, yakni: **"Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan."**

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Secara nasional, pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam